

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlawanan merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial yang timbul dalam masyarakat yang tertindas. Masyarakat tertindas merupakan kelompok masyarakat yang mengalami pembatasan hak, ketidakadilan struktural, serta tekanan dari pihak yang berkuasa, pihak yang berkuasa disini yakni Belanda. Perlawanan juga dapat diartikan sebagai bentuk perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari keadaan atau gerakan yang menekan baik tanpa atau berupa kekerasan.¹ Membebaskan diri dimaksud disini adalah bebas dari penjajahan pasca kemerdekaan. Kemerdekaan yang diinginkan telah tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Haraus pupus karena kembalinya penjajahan di bumi Indonesia, hingga timbulnya perlawanan dari masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk perlawanan dapat dilihat dari sejarah Indonesia dalam mempertahankan eksistensi kemerdekaannya dalam serangan Agresi Militer Belanda. Belanda kembali ke daerah bekas kekuasaannya dan melakukan agresi militernya dalam dua tahap, yakni agresi militer I dan II.

Belanda dalam pikiran masyarakat adalah bangsa yang melakukan tindakan kekerasan, penjajahan dan lainnya terhadap masyarakat Indonesia walaupun dilihat dari sisi positif Belanda datang juga berhasil membangun ekonomi, pendidikan dan lainnya bagi masyarakat. Awal kedatangan yang hanya bertujuan untuk menjalin hubungan dagang berubah menjadi keinginan menguasai Indonesia² sehingga terjadilah peperangan/kekerasan terhadap warga Indonesia dengan begitu sadis pada tahun 1945-1949. Setelah Belanda menampilkan keegoisan/maksud sebenarnya datang kembali ke Indonesia, membuat para pemimpin juga masyarakat bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi,

¹Eka Damayanti Hasibuan, Muhammad Basri, and Diana Siregar, "Situasi Dan Kondisi Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 325–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.596>.

²Sudarman Sudarman and Wewel Madora, "Hero Dan Kekerasan Pada Masa Agresi Militer Belanda I Dan II (1945-1949)," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 3798 (2019): 189–200, <https://doi.org/10.15548/khazanah.vi.244>.

bahkan dengan nyawa pun Haraus dikorbankan. Peneliti menemukan beberapa arsip berisi tentang perundingan gencatan senjata,³ persiapan-persiapan yang diperlukan jika Belanda melakukan penyerangan,⁴ strategi dalam menghadapi tentara Belanda,⁵ dan antisipasi serangan yang dapat dilakukan.⁶

Agresi Militer Belanda I dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 yang dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran dan kepentingan antara Indonesia dan Belanda,⁷ yang menyebabkan beberapa daerah di Jawa dan Sumatera berhasil dikuasai.⁸ Perbedaan penafsiran disini adalah perbedaan pandangan antara Belanda-indonesia dalam perjanjian Linggarjati yang ditanda tangani pada tahun 1946. Indonesia menganggap perjanjian ini sebagai pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menganggap sebagai langkah awal menuju kemerdekaan. Sedangkan perbedaan kepentingan, Belanda membutuhkan Indonesia untuk memulihkan ekonominya yang rusak akibat perang dunia II dan Belanda menginginkan posisi strategis Indonesia yang berada dalam jalur perdagangan dan komunikasi antara Eropa dan Asia.

Keinginan untuk menguasai Indonesia yang sangat besar terus berlanjut hingga terjadi agresi militer II pada tahun 1948-1949 yang menyebabkan dampak lebih besar dari Agresi sebelumnya. Belanda kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Indonesia dengan tujuan untuk menghancurkan perlawanan rakyat dan menguasai kembali wilayah Indonesia. Dampak paling besar dari

³Major A. Karim Rasjid, "Arsip Laporan Wakil Kepala. Kepala Staf Umum II Tentara Komondo. Sumatera Tentang Perundingan Cease Fire Order (Gencatan Senjata) Antara Indonesia – Belanda Di Padang" (Bukittinggi: ANRI : Delegasi Indonesia, 1948).

⁴Soemartojo, "Arsip Surat Dari Dewan Partai-Partai Sosialis Indonesia Kepada Dewan Daerah Besar Partai Sosialis Indonesia Bukit Tinggi Tentang Berbagai Macam Persiapan Menghadapi Perang Melawan Belanda Serta Kemungkinan Yang Akan Terjadi" (Jogyakarta: ANRI : Delegasi Indonesia, 1948).

⁵Komando Sub Teritorium Sumatera Barat, "Arsip Maklumat No. 3/KKT-49 Komando Subteritorial Kesatuan Sumatera Barat Tentang Perang Gerilya, Menyusun Tenaga Rakyat, Perbelanjaan Angkatan Perang, Organisasi Dan Persetujuan Yang Di Capai Antara Delegasi Republik Dan Delegasi Belanda" (Sumatera Barat: ANRI : Delegasi Indonesia, 1949).

⁶Komando Militer Sumatera Barat, "Arsip Petunjuk No. 1/KTK/P Komando Subteritorial Kesatuan Sumatera Barat Tentang Strategi Yang Dipakai Oleh Belanda Untuk Menguasai Tanah Air, Sehingga Pihak RI Dapat Mengantisipasi" (Sumatera Barat: ANRI: PDRI, 1949).

⁷Steiner and H Arthur, "Text of the Linggadjati Agreement," houseofdavid.ca (The Journal of Politics 9(4), 1947), <https://share.google/KXWaeA4a4033SXnpi>.

⁸Septia Ria Utami, Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949 (Kalimantan: CV. Derwati Press, 2019). hlm 59

agresi kedua Belanda ini yakni terjadinya kekosongan pemerintahan Indonesia akibat ditangkap dan diasingkannya pemimpin Indonesia.⁹ Penangkapan yang dilakukan terhadap pemimpin Indonesia membuat tatanan Negara menjadi kacau dan membuat Indonesia menjadi Negara yang dipertanyakan kedaulatan kemerdekaannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat dan menggerakkan perlawanan masyarakat demi mempertahankan kedaulatan kemerdekaan negaranya. Jatuhnya ibu kota Jogjakarta juga menjadi dampak dari agresi militer kedua.

Sebelum terjadinya penangkapan terhadap pemimpin Indonesia, telah terjadi perundingan sebagai solusi atas kekhawatiran yang terjadi. Kekhawatiran atas jatuhnya ibu kota Jogjakarta membuat pemimpin negara Harus bergerak cepat untuk mencari solusi mempertahankan Indonesia hingga terjadilah perundingan. Perundingan dilakukan antara pemimpin Indonesia dan kabinet lainnya untuk memutuskan mencari lokasi yang aman untuk melanjutkan perjuangan diplomasi dan mempertahankan eksistensi Negara.¹⁰ Perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwa pemerintahan Indonesia akan akan dipindah ke Sumatera yakni Bukittinggi. Bukittinggi dipilih sebagai daerah yang strategis di Sumatera Barat yang memiliki infrastruktur memadai dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Perundingan tersebut juga memutuskan Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden darurat dan diminta untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Bukittinggi.¹¹

Pemerintahan Darurat ini menjalankan fungsi negara, mulai dari koordinasi militer diplomasi internasional, hingga penyebaran informasi perjuangan. Selama menjalankan fungsi sebagai ibu kota darurat, berbagai institusi pemerintahan, markas militer, serta jaringan komunikasi ditempatkan di sejumlah lokasi yang dinilai aman dari ancaman serangan udara pihak musuh. Pemerintah Darurat Republik Indonesia juga mengoordinasikan penyiaran melalui Radio Rimba Raya

⁹Wahjudi Djaja, *PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)* (Klaten: PT Cempaka Putih, 2018), hlm 8.

¹⁰Firdaus, "Bukittinggi: Ibu Kota Darurat Penyelamat Republik 1948-1949," accessed January 27, 2026, <https://www.kotabukittinggi.com/bukittinggi-ibu-kota-darurat-ri/>.

¹¹Soekarno and Hatta, "Arsip Mandat Presiden Kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara" (Jogyakarta: PDRI, 1948).

di Aceh sebagai sarana komunikasi strategis untuk menyampaikan kepada masyarakat internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis dan terus melakukan perlawanan. Upaya ini secara efektif melemahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kehancuran.¹²

Selama masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), berbagai Institusi/organisasi dibentuk sebagai upaya menjaga keamanan serta melakukan perlawanan terhadap agresi militer. Struktur pertahanan tersebut terdiri atas sejumlah komando militer seperti MPRD (Markas Pertahanan Rakyat Daerah), MPRK (Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan), BPNK (Badan Pengawal Nagari dan Kota) dan PMT (Pasukan Mobil Teras)¹³. Gerakan perlawanan juga diperkuat oleh batalion-batalion militer, seperti batalion Singa Harau¹⁴ dan batalion lainnya yang ada di bawah militer Sumatra Tengah saat itu. Selain kekuatan militer reguler, perlawanan turut melibatkan barisan pemuda yang sebelumnya telah memperoleh pelatihan militer maupun yang bergabung atas kesadaran sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan. Sinergi antara unsur militer dan masyarakat sipil ini mencerminkan penerapan sistem pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh elemen bangsa berperan aktif dalam menghadapi agresi dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selang waktu terjadinya penyerangan di ibukota Yogyakarta, Pada tanggal 22 Desember 1948 Bukittinggi juga berhasil dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian, jatuhnya Bukittinggi ke tangan Belanda, menjadi jembatan Belanda untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya dengan mudah seperti Payakumbuh pada tanggal 23 Desember 1948 setelah dua hari membombardir Payakumbuh lewat Udara.¹⁵ Berhasilnya dikuasai Payakumbuh oleh Belanda pada tanggal 23 Desember 1948, menjadi titik perjuangan para pemuda Payakumbuh khususnya pemuda pejuang 45 di Koto Nan Gadang yang ikut serta mempertahankan

¹²Firdaus, "Bukittinggi: Ibu Kota Darurat Penyelamat Republik 1948-1949."

¹³M Reki Hidayat and Etmi Hardi, "Koto Tuo Lautan Api: Sebuah Peristiwa Pada Masa Pdri Di Sumatera Barat (1948-1949)," *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. X (2023): 220, <https://doi.org/10.24114/ph.v8i2.45393>.

¹⁴Dedi Asmara and Y Yuhardi, "Batalion Singa Harau (1945-1949)," *Jurnal Edukasi* 2, no. 1 (2022), <https://mail.jurnaledukasi.stkipabdi.ac.id/index.php/JED/article/download/50/33>, hlm 4.

¹⁵Mardisun, "Peristiwa/Sejarah Pemuda Gerilya Antara Koto Nan Gadang Payakumbuh Di Pusat Pemerintah Darurat Republik Indonesi (PDRI)" (Payakumbuh, 1995), hlm 11.

eksistensi kemerdekaan Indonesia. Perlawanan tersebut didasari oleh tindakan kolektif sebagai upaya perlawanan terhadap Belanda yang diketuai Oleh seorang pemuda pribumi bernama Mardisun. Ia juga menulis catatan sejarah gerilya yang mereka lakukan yang diberi judul *Peristiwa/Sejarah Pemuda Gerilya Antara Koto Nan Gadang Payakumbuh di Pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tahun 1995*, dalam tulisannya diceritakan bagaimana latarbelakang pemuda tersebut ikut serta dalam kegiatan gerilya, cara dalam menghimpun dan mengumpulkan para pemuda yang mau ikut bergerilya, hingga penyerangan/perlawanan yang dilakukan terhadap Belanda yang ada di Payakumbuh.

Para pejuang, dalam diri mereka telah ada agama Islam yang mendarah dalam masyarakat Minangkabau dan adat yang dijunjung dalam setiap langkah menjadi ideologi perlawanan yang para pejuang lakukan. Islam dengan ajaran jihadnya membentuk diri merelakan nyawa demi mempertahankan negara dan adat yang mengajarkan untuk mencintai dan membela tanah nagari sendiri. Payakumbuh khususnya Sumatera Barat yang terkenal dengan adat istiadat dan agama islam sebagai agama menjadi alasan utama mengapa perlawana terus dilakukan. Selain itu, ideologi nasionalisme yang telah ada sejak tahun 1912¹⁶ juga menjadi tonggak berjalannya perlawanan khususnya bagi pemuda Nagari Koto Nan Gadang. Berbagai upaya dilakukan oleh para pemuda pejuang untuk memukul Belanda dari daerah mereka.

Selain latarbelakang ideologi agama, adat, dan nasionalisme sebagai penggerak perlawanan, posisi geografis daerah perlawanan juga menjadi alasan terjadinya perlawanan. Pada masyarakat Koto Nan Gadang, Perlawanan dilakukan karna menjadi satu-satunya wilayah yang dekat dengan markas kedudukan Belanda di Payakumbuh. Selain itu, wilayah ini juga menjadi satu-satunya wilayah yang masih ada penduduknya, akibat pengungsian besar-besaran yang

¹⁶Erman, "Perlawanan Ulama Minangkabau Terhadap Kebijakan Kolonial Di Bidang Pendidikan Abad XX," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 1 (2015): 1–21, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=EWfQwEoAAAAJ&citation_for_view=EWfQwEoAAAAJ:eQOLeE2rZwMC, hlm 7.

dilakukan untuk menghindari penyerangan dari pasukan tentara Belanda.¹⁷ Kondisi tersebut menjadikan Koto Nan Gadang sebagai titik strategis sekaligus benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat setempat. Keberadaan penduduk yang masih bertahan memungkinkan terbentuknya solidaritas dan koordinasi perlawanan secara lebih terorganisir terhadap kekuatan kolonial Belanda.

Hadirnya kemerdekaan Indonesia, dengan TNI sebagai pondasi kekuatan kedaulatan, maka terbentuklah organisasi Pemuda Indonesia di berbagai kota dan desa di Indonesia. Mereka juga dilatih militer dengan menggunakan senjata. Para pejuang Koto Nan Gadang juga memiliki latarbelakang militer karena pernah masuk dalam barisan militer BAGODA pada zaman Jepang.¹⁸ Bagi Pejuang Koto Nan Gadang, ini merupakan pengalaman perlawanan pertama mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Latarbelakang yang sudah memiliki pengalaman militer membuat ikut dalam perlawanan dengan cara kontak fisik atau menggunakan senjata/perang. Perlawanan yang dilakukan dengan perang tersebut tidak sedikit memakan korban baik dari pihak masyarakat lokal maupun pihak Belanda. Bidang ekonomi, kehidupan masyarakat yang tidak aman dan sebagainya juga terenggut selama masa perlawanan terhadap agresinya tersebut digalakkan. Beberapa perlawanan yang dilakukan oleh pemuda Koto Nan Gadang adalah membakar rumah agar tidak dipakai oleh Belanda, penyerangan ke setiap pos-pos Belanda di Payakumbuh, menghambat pasokan makanan Belanda masuk ke Payakumbuh, memutuskan jalan (jembatan) dan sebagainya. Didirikan juga pos-pos pertahana dan memilih daerah-daerah yang menjadi area pertempuran yakni daerah Tanjung Anau-Balai Batuang-Talawi.¹⁹

Perlawanan sengit yang telah dilakukan hampir menemui titik akhir, dimana dilakukan Perundingan KMB untuk pengakuan kedaulatan dari Belanda. Di Sumatera Barat, pada tanggal 30 Agustus 1949, dikeluarkannya surat dari Gubernur Militer Inspeksi II yang berisi perintah penghentian aksi tembak-menembak, seiring dengan rencana penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada

¹⁷ Mardisun, "Peristiwa/Sejarah Pemuda Gerilya Antara Koto Nan Gadang Payakumbuh Di Pusat Pemerintah Darurat Republik Indonesi (PDRI)."

¹⁸ Mardisun, hlm 5.

¹⁹ Mardisun.

Negara Republik Indonesia Serikat. Penghentian tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri untuk penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Sementara (RIS). Namun, penghentian tembak menembak tersebut hanya berlangsung sementara karena tentara Belanda menembak dua penjaga garis Demarkasi di Tanjung Anau. Otomatis kejadian itu memantik/memicu kembali amarah pejuang yang tidak terima atas penembakan yang dilakukan terhadap teman mereka. Malam itu juga, pemuda gerilya bertekad untuk menyerang pos Belanda sebagai aksi balas dendam atas apa yang telah terjadi. Penyerangan yang dilakukan tersebut mengakibatkan beberapa pejuang tertangkap dan diadili di Jembatan Ratapan Ibu.²⁰ Jembatan yang terletak di Pasar Ibu ini menjadi tempat eksekusi para pejuang Indonesia yang tertangkap oleh tentara Belanda. Para orangtua hanya bisa meratapi peristiwa tersebut dan untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun manumen Ratapan Ibu yang menunjuk kearah jembatan/air batang agam.

Selama ini, penelitian selama masa PDRI hanya terpusat pada Sejarah dan Perjalan pemerintahan PDRI,²¹ Perjuangan PDRI,²² daerah-daerah yang ikut dalam mempertahankan kemerdekaan,²³ tokoh ulama seperti Syekh Abbas Abdullah Padang Japang yang ikut dalam masa PDRI.²⁴ Penelitian tentang perjuangan/perang yang dilakukan masyarakat Payakumbuh, khususnya Koto Nan Gadang belum tersentuh. Padahal masyarakat Koto Nan Gadang mempunyai partisipasi besar dalam periode darurat pemerintahan masa itu. Apakah ada maksud lain dari para pejuang ini dalam menggalakkan perlawanan, seperti pengalihan tentara Belanda terhadap pemerintahan PDRI. Dapat kita lihat bahwa, walaupun beberapa kali dan bahkan ada korban dari pemimpin PDRI, perjalanan

²⁰Kees Spikes, "GEACHTE REDACTIE; Soldaat Prince," Delpher (NV De Volkskrant, 1994), <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Payakumbuh+&coll=ddd&identifier=ABCD DD:010866759:mpeg21:a0175&resultsidentifier=ABCD DD:010866759:mpeg21:a0175&rowid=>.

²¹Mestika Zed, *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*, cet. 2 (Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi, 2004).

²²Yelda Syafrina, Erniwati, and Ridho Bayu Yefterson, *Sejarah Indonesia Kontemporer: Sumatera Barat Masa Perang Kemerdekaan* (Sleman: Deepublish, 2023).

²³Dedi Asmara, "Nagari Koto Tuo Kab. Lima Puluh Kota Pada Masa Darurat Sipil (1948-1949)" 15, no. 19 (2014): 124–37.

²⁴Andre Fernando and Etmi Hardi, "Syekh Abbas Abdullah Padang Japang: Tokoh Pejuang Pada Masa PDRI 1948-1949," *Galanggang Sejarah* 1, no. 1 (2019): 74–89.

pemerintahan gerilya tersebut tetap berjalan dengan semestinya. Hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi dan jejak sejarah yang terlupakan ini perlu diungkap dan menjadi bukti khazanah sejarah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah tersebut diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana sejarah perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II?
- 1.3.2 Bagaimana bentuk pola strategi perlawanan masyarakat Koto Nan Gandang terhadap Agresi Militer Belanda II?
- 1.3.3 Apa saja dampak perlawanan rakyat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II?

1.4 Batasan Masalah

1.4.1 Batasan Spasial

Batasan spasial adalah ruang lingkup penelitian yang dibatasi oleh tempat, wilayah geografis, atau administratif tertentu, seperti kota, desa, atau wilayah administratif khusus. Batasan ini mendefenisikan lokasi spesifik tempat fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Payakumbuh, spesifikasinya di Koto Nan Gadang. Koto Nan Gadang merupakan salah satu nagari (sekarang masuk ke wilayah administrasi kota madya) yang ada di Payakumbuh dan menjadi salah satu bukti perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Kolonial Belanda pada masa Agresi Militer Belanda II. Secara Geografis, Nagari Koto Nan Gadang terletak dekat dengan daerah markas kedudukan Belanda di Payakumbuh yakni berada di pusat pasar kota Payakumbuh (saat ini). Selain itu, belum adanya pembahansan mengenai perlawanan masyarakat Nagari Koto Nan

Gadang juga menjadi alasan penting dalam pengambilan lokasi ini sebagai tempat penelitian.

1.4.2 Batasan Tematis

Batasan tematis adalah tema atau aspek yang akan diteliti. Batasan tematis penelitian ini yakni sejarah sosial dengan memfokuskan pada perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II di Payakumbuh.

1.4.3 Batasan Temporal

Batasan temporal yaitu batasan terhadap waktu yang dipilih dalam suatu penelitian sehingga menjadi focus analisis. Batasan waktu penelitian ini adalah tahun 1949, dimana tahun tersebut terjadi Agresi Militer Belanda II dan peristiwa berdarah sebagai bentuk perlawanan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan pasca kemerdekaan. Penelitian ini mengambil dari Desember 1948, dimana Agresi Belanda II masuk ke Payakumbuh, hingga November 1949, dimana akhir dari Agresi Militer Belanda di Payakumbuh khususnya di Indonesia dengan disepakatinya perjanjian perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar) yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia (RIS) oleh Belanda.

1.5 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis bagaimana sejarah perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II
2. Menganalisis bentuk/pola strategi gerilya yang dilakukan oleh masyarakat Koto Nan Gadang dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II
3. Mengungkapkan dinamika dari perlawanan masyarakat Koto Nan Gadang terhadap Agresi Militer Belanda II

Kegunaan penelitian ini secara akademik dan peneliti sendiri berharap bahwa penelitian ini akan memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut adalah:

1. Untuk akademik, Menambah kajian penelitian dan pengetahuan dalam bidang sejarah lokal dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Indonesia

2. Untuk Peneliti, Menambah pengetahuan peneliti tentang sejarah PDRI, perlawanan rakyat dan kontribusi rakyat dalam sejarah pemerintahan Indonesia

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk penulisan tesis ini berjalan sesuai dengan tujuan dan tersusun secara sistematis, pembahasan Haraus dibuat berdasarkan sistematika penulisan. Sistematika penulisan tesis yang berjudul “Perlawanan Masyarakat Koto Nan Gadang Terhadap Agresi Militer Belanda II” terdiri dari 6 bab yakni sebagai berikut:

Bagian I, berisi tentang, *petama*, latar belakang yang menguraikan argumentasi ilmiah berdasarkan kajian literatur dan atau fakta empiris yang menjadi alasan pentingnya penelitian yang diajukan pada tugas akhir, *kedua*, rumusan masalah atau fokus penelitian adalah permasalahan penelitian yang akan diselesaikan atau dipecahkan oleh mahasiswa, *ketiga*, Pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada bab pembahasan atau yang akan diteliti. *keemat*, batasan masalah adalah pertanyaan penelitian yang diajukan berdasarkan rumusan masalah yang hendak dijawab oleh mahasiswa melalui penelitian tugas akhir, *Kelima*, Tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik bagi akademisi maupun untuk peneliti sendiri. *keenam*, Sistematika penulisan, susunan atau kerangka penulisan tesis.

Bab II berisi tentang, *pertama*, Kerangka Teori menjelaskan teori yang digunakan sebagai bingkai kerja mahasiswa dalam menulis tugas akhir. Bagian ini menjelaskan konstruksi teori yang akan digunakan bukan konsep-konsep atau definisi-definisi yang berhubungan dengan teori tersebut, *kedua*, Literatur Review menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian tugas akhir mahasiswa. Penulisan literatur dilakukan dengan menganalisis topik metode, temuan dan teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya secara kritis dengan membanding antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Literatur itu diakhiri dengan diskusi akademis yang menunjukkan kebaruan atau novelty penelitian tugas akhir yang akan dilakukan oleh mahasiswa.

Bab III yaitu metode penelitian, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Pada bagian ini akan dibahas mengenai tahapan, dan cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mendapatkan sumber, maka peneliti harus melakukan kritik eksternal dan internal untuk memperoleh sumber yang relevan dan terpercaya. Setelah tahapan kritik selesai, penulis melakukan interpretasi dengan menganalisis dan melakukan perbandingan terhadap semua fakta atau informasi yang telah diperoleh. Dan tahap terakhir, yaitu historiografi yang akan penulis paparkan pada bab berikutnya. Seluruh tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan diuraikan secara rinci dalam bab ini.

Bab IV dan V berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab IV menguraikan atau membahas tentang sejarah Nagari Koto Nan Gadang baik itu kondisi geografi, penduduk dan ekonomi, dan dinamika sosial dan keagamaan. Sedangkan bab V, membahas tentang proses perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan, organisasi perlawanan dan dampak perlawanan yang dilakukan.

Bab VI Penutup yang berisi tentang kesimpulan, rekomendasi, implikasi, dan keterbatasan studi. Kesimpulan berisi tentang klaim akademik mahasiswa terhadap hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian yang dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan. Rekomendasi ini merupakan saran konkret yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, baik itu institusi, individu, maupun masyarakat secara umum. Saran-saran tersebut didasarkan pada temuan penelitian dan ditujukan untuk memberikan solusi, meningkatkan efektivitas, atau memperbaiki aspek-aspek tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bab ini juga menjadi panduan untuk tindakan lebih lanjut, baik dalam bentuk pengembangan penelitian selanjutnya atau implementasi di lapangan.

Bagian akhir yakni berisi tentang daftar pustaka lampiran yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah.